

## INKLUSI KEUANGAN; SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN GUNA DAYA SAING PEREKONOMIAN BANGSA

Mohammad H. Holle<sup>1</sup>

### ABSTRACT

This article aims to examine in a second the concept of financial inclusion in relation to poverty alleviation solutions for the competitiveness of the nation's economy. Indonesian financial inclusion by the results of the 2016 National Financial Inclusion Survey tend to have a high financial inclusion index. DKI Jakarta is the best because it has a high financial literacy index of 40.0% and a financial inclusion index of 78.2%. In contrast, West Papua Province has a relatively low financial inclusion index. Although the inclusion index is quite high, the number of provinces above the average is not much. That means there is still a need for concerted efforts to encourage all provinces in Indonesia to have a high financial inclusion index.

The solution to overcome poverty and the competitiveness of the nation's economy is to position the banking sector to increase lending, especially productive investment loans by upholding the principles of risk management. Need to promote financial awareness, especially for low income families. This can help them avoid debt, increase their economic activities, increase family income and escape poverty. The application of financial inclusion can be applied through social payments for the poor, credit extension schemes that are compatible with micro and small businesses accompanied by guarantees of banking funds, and digital financial services. Overall, financial inclusion is one of the strategies in achieving inclusive growth which will ultimately reduce inequality in society and reduce poverty.

*Keyword: financial inclusion, poverty, competitiveness*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji secara detik konsep inklusi keuangan dalam kaitannya dengan solusi pengentasan kemiskinan guna daya saing perekonomian bangsa. Inklusi keuangan Indonesia oleh data hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan tahun 2016 cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbaik karena memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi yaitu 40,0% dan indeks inklusi keuangan 78,2%. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah. Walaupun indeks inklusi cukup tinggi, namun jumlah provinsi yang di atas rata-rata tidaklah banyak. Itu artinya masih diperlukan upaya bersama untuk mendorong agar semua provinsi di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi.

Solusi untuk mengatasi kemiskinan dan daya saing ekonomi bangsa, memposisikan sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama kredit investasi yang produktif dengan memegang teguh prinsip manajemen resiko. Perlu mempromosikan kesadaran keuangan, khususnya untuk keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu mereka menghindari utang, meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan keluarga dan melepaskan diri dari kemiskinan. Penerapan inklusi keuangan dapat diterapkan melalui pembayaran sosial kelompok miskin, pemberian kredit dengan skema yang compatible dengan usaha mikro dan kecil disertai dengan penjaminan dana perbankan, serta layanan keuangan digital. Secara keseluruhan, inklusi keuangan merupakan salah satu strategi dalam pencapaian pertumbuhan inklusif yang pada akhirnya akan mereduksi ketimpangan yang ada di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

*Keyword: Inklusi keuangan, kemiskinan, daya saing*

<sup>1</sup> Mohammad H. Holle, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan (UINSA) Ampel Surabaya dan Dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah IAIN Ambon

## A. Latar Belakang

Daya saing ekonomi perdesaan dapat berkembang melalui strategi pertumbuhan ekonomi inklusif. Walau sering dipertukarkan istilah dengan pertumbuhan tersebut (*broad based economic growth*) atau pertumbuhan yang pro-kemiskinan (*pro poor economic growth*)<sup>2</sup>, pertumbuhan inklusif mempunyai makna dan implikasi yang lebih luas dari keduanya. Pertumbuhan inklusif merupakan pendekatan pertumbuhan yang berbasis pada kekuatan sumber-sumber pertumbuhan yang ada dan tersebut, baik antara sektor maupun wilayah, termasuk pendekatan padat karya, dan sekaligus pendekatan pertumbuhan yang berfokus pada *outcome*, yakni penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan absolute, pertumbuhan inklusif juga akan menurunkan disparitas, mendorong tumbuhnya kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing kelompok miskin.

Ali dan Zhuang mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang berbasis pada upaya mendorong tercapainya kesamaan kesempatan, dan perluasan akses ke pasar dan sumberdaya, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara aktif dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Definisi ini tidak berbeda jauh dari definisi Bank Dunia dalam laporannya tahun 2006. Ada dua hal yang selalu dirujuk berkaitan dengan pertumbuhan inklusif, yakni tahapan dan pola pertumbuhan serta *outcome* berupa penurunan kemiskinan.<sup>3</sup>

Penurunan kemiskinan saja tidaklah cukup karena pertumbuhan tersebut juga harus berkualitas dan terwujud dalam bentuk kenaikan produktivitas kelompok yang tidak beruntung, menurunnya disparitas pendapat dan asset, meningkatnya akses dan juga proteksi pasar dan sumberdaya, dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Bukan hanya itu, pertumbuhan inklusif juga harus memberikan manfaat bukan hanya kepada mereka yang miskin, melainkan juga kepada yang hampir miskin, kelompok kelas menengah, bahkan yang kaya sekalipun.

Hasil Survei Nasional OJK menunjukkan bahwa sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk

---

<sup>2</sup> Pertumbuhan pro-kemiskinan adalah ketika pendapatan orang miskin meningkat. Pendapat lain menganggap bahwa pertumbuhan yang dapat meningkatkan pendapatan miskin secara proporsional lebih dari peningkatan pendapatan rata-rata dalam masyarakat (Lihat : Kakwani et al. Dalam Maria Piotrowska, *The Direct and Indirect Effects of The Pro-Poor Growth*, 2004), h. 252, dan Ravallion, *A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research; Working Paper 3579*, April 2005). Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

<sup>3</sup> Ali dan Zhuang, *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*, (Asian Development Bank, 2007), h. 1.

memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

Begitupun hasil survey OJK tentang indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan indeks literasinya. Indeks inklusi keuangan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 59,7% masyarakat Indonesia telah mengakses lembaga jasa keuangan formal. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8.1%.<sup>4</sup>

Demikian halnya dengan indeks inklusi keuangan untuk perbankan yang masih mendominasi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan lainnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga belum merata di setiap provinsi.

Dalam survei yang dilakukan OJK pada tahun 2016 diketahui bahwa sebanyak 42,5% masyarakat pernah mengalami kondisi dimana penghasilan yang dimiliki tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam satu tahun terakhir. Dari kondisi tersebut, 26,5% masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kondisi dimaksud, antara lain menarik tabungan (33,6%) dan meminjam dari keluarga atau teman (20,9%). Sementara upaya yang dilakukan dan berhubungan dengan lembaga jasa keuangan masih terbilang rendah yaitu pinjaman di lembaga jasa keuangan formal (5,5%) dan pinjaman dengan gadai (3,8%).

Kondisi inklusi keuangan di Indonesia dapat dikatakan masih rendah atau dapat dikategorikan dalam eksklusi keuangan. Posisi indeks keuangan inklusif Indonesia yang hanya 36% pada tahun 2014 cukup tertinggal dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Thailand 78%, Malaysia 81%, meski lebih besar dari Filipina dan Vietnam yang masing-masing 31%.<sup>5</sup>

Sementara tahun 2019, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016, dimana indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai. Survei OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan

---

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (OJK: Jakarta, 2017), h. 21

<sup>5</sup> *Bulletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 20 nomor 1 Juli 2017.

*gender* dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 tetap menggunakan metode, parameter dan indikator indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*). Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks inklusi keuangan masyarakat pedesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan *gender* indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan 77,24%, relatif lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%. OJK menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 ini untuk penyempurnaan strategi pengembangan inklusi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.<sup>6</sup>

Terlepas dari meningkatnya angka inklusi keuangan Indonesia, masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana kemiskinan ekstrim pada daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pelosok. Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antar provinsi juga semakin besar. Kemiskinan di kawasan timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sebagai akibatnya, koefisien Gini pendapatan semakin meningkat sejak tahun 1990an.<sup>7</sup>

Hal ini, kata Demirguc-Kunt et al., menuntut upaya pemerintah guna menyusun konsep kongkrit yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaatnya. Untuk itu, inklusifitas pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan populis guna menurunkan angka kemiskinan. Jika tidak berusaha melenyapkan “*financial barriers*” pada produk dan layanan jasa keuangan, akan memunculkan adagium bahwa masyarakat miskin akan tetap menjadi miskin. Sederhananya, konsep sistem keuangan yang inklusif tidak hanya muncul sebagai program yang *pro-growth*, namun juga *pro-jobs* untuk masyarakat miskin (*pro-poor*).<sup>8</sup>

Inklusi keuangan menjadikan masyarakat miskin menjadi kelompok sasaran. Hal ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menysasar kelompok yang mengalami hambatan untuk

---

<sup>6</sup> Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, SP 58/DHMS/OJK/XI/2019.

<sup>7</sup> I Made Sanjaya, Nursechafia, “*Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*”, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016, h. 282

<sup>8</sup> Demirguc-Kunt, A., T. Beck, P. Honohan. “*Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*”. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report, 2008), h. 282.

mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menysasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Masyarakat miskin sepenuhnya belum bersentuhan dengan lembaga formal keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan. Akses masyarakat miskin untuk mendapatkan financial service dari lembaga keuangan cenderung masih kecil. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ketersediaan jumlah service financial formal. Bukan hanya jumlahnya, tapi akses jangkauan lembaga formal keuangan juga belum maksimal. Begitupun masyarakat miskin sendiri belum maksimal menggunakan layanan lembaga keuangan formal.

Inklusi keuangan menunjukkan bahwa individu dan rumah tangga yang kurang beruntung dan area yang dirampas lebih mungkin dipengaruhi oleh pengecualian dari sistem keuangan, hal ini juga terkait dengan biaya ekonomi dan sosial bagi mereka yang terkena dampak.

## **B. Makna Inklusi Keuangan**

Menurut Gloukoviezoff, produk keuangan memainkan peranan penting dalam masyarakat saat ini. Mampu mengakses dan menggunakan berbagai macam produk dan layanan keuangan sekarang diperlukan 'untuk menjalani kehidupan sosial yang normal.'<sup>9</sup>

Konsep inklusi keuangan, kemudian mengacu pada ketidakmampuan individu untuk mengakses dan / atau secara efektif menggunakan produk keuangan yang membantu mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang merupakan kehidupan sosial.

Inklusi keuangan juga didefinisikan oleh Ogunsakin et.all, sebagai salah satu alat kebijakan yang efektif yang digunakan oleh pemerintah negara-negara maju dalam memerangi dan mengurangi tingkat kemiskinan mengingat kemampuannya untuk memfasilitasi alokasi sumber daya produktif yang efisien, yang mengurangi biaya modal.<sup>10</sup>

Dalam strategi nasional keuangan inklusif, inklusi keuangan didefinisikan sebagai: Hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian

---

<sup>9</sup> Gloukoviezoff dalam Nicole Lederle, *Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People*, (Heriot-Watt University School of the Built Environment, 2009), h. 1.

<sup>10</sup> Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug.2017), h. 01-10

khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.<sup>11</sup>

Josua Pardede mengatakan inklusi keuangan adalah peningkatan penyediaan jasa keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat, yang diikuti dengan meningkatnya volume pasar.<sup>12</sup> Menurutnya volume pasar keuangan yang dihasilkan dari kemajuan sektor keuangan ini diharapkan dapat menyerap volatilitas dari setiap pelaku pasar.

Claessens, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan pasokan layanan keuangan berkualitas yang wajar dengan biaya yang wajar, di mana kualitas yang wajar dan biaya yang masuk akal harus ditentukan relatif terhadap beberapa standar obyektif, dengan biaya yang mencerminkan semua biaya keuangan dan non-keuangan. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa akses ke layanan keuangan datang dengan beberapa kemiripan manfaat (tabungan, kredit, bunga kredit, dll) dan biaya dalam bentuk biaya bank dan komisi.<sup>13</sup>

Rangarajan Committee di India mendefinisikan inklusi keuangan, sebagai proses memastikan akses kelayakan keuangan dan kredit memadai tepat waktu di mana diperlukan oleh kelompok rentan atau yang lebih lemah dan kelompok berpenghasilan rendah namun dengan harga yang terjangkau.<sup>14</sup>

Sementara Bank dunia mengartikan inklusi keuangan bahwa individu dan bisnis memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka – transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi – disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta kualitas.

Sementara menurut beberapa pakar ekonomi, teori dasar inklusi keuangan adalah perkembangan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jalur *supply – leading* maupun *demand – following*.

---

<sup>11</sup> Bank Indonesia. *Booklet Keuangan Inklusif*. (Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 2014), h. 1

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Claessens (2006) dalam, Mohammed Ibrahim Jabir, *Financial Inclusion And Poverty Reduction In Sub-Saharan Africa*, (College Of Humanities University Of Ghana, 2015), 15

<sup>14</sup> Rangarajan Committee, (2008), *Ibid*

<sup>15</sup> Bank Dunia. <http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion>. Tanggal terbit, 27 Mei 2018

### C. Bagaimana Mengukur Pertumbuhan Inklusif ?

Mengukur pertumbuhan inklusif tidak cukup hanya mencakup dimensi pendapatan, tetapi juga dimensi non-pendapatan. Bank Pembangunan Asia mengusulkan beberapa indikator untuk mengukur pertumbuhan inklusif: (i) Penurunan tingkat kemiskinan absolut pada kelompok miskin (dengan standar pendapatan 2,5 dollar AS per hari); (ii) Peningkatan lapangan kerja pada kelompok miskin dan tidak beruntung; (iii) Penurunan disparitas baik pendapatan maupun non-pendapatan antara kelompok, golongan, etnis, serta kelompok minoritas; (iv) Peningkatan kapasitas kelompok yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan yang lebih baik sehingga mereka dapat berpartisipasi dan akan mendapat manfaat dari pertumbuhan; dan (v) Integrasi sosial yang lebih baik.<sup>16</sup>

Pengukuran pertumbuhan inklusif ini selaras dengan evolusi konsep pembangunan yang menekankan semakin pentingnya sumber pertumbuhan ekonomi nonfisik dan modal sosial,<sup>17</sup> dan evolusi konsep kemiskinan yang menekankan pentingnya mitigasi kemiskinan dari dimensi nonfisik karena lemahnya akses ke sumber daya pendidikan, kesehatan, hak-hak politik, dan lemahnya kelembagaan.<sup>18</sup>

Kebijakan keuangan inklusif menurut Onaolupo yang efektif berdampak pada ekonomi karena berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, dalam studi Levine, menyimpulkan bahwa infrastruktur kelembagaan dari sistem keuangan berkontribusi untuk mengurangi asimetri informasi keuangan, kontraksi dalam transaksi, biaya, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

### D. Daya Saing Ekonomi dan Kemiskinan

Penilaian indeks daya saing Indonesia lebih banyak tertolong oleh faktor inovasi dengan menempati peringkat 30 dari 144 negara, sementara faktor kebutuhan primer dan faktor efisiensi menempati peringkat 46 dari 144 negara. Dalam hal kemampuan berinovasi, Indonesia menempati peringkat 22 dari 144 negara dengan nilai 4.8 (skala 1-7), nilai ini di atas negara maju lain seperti Kanada (26), Australia (27), dan Italia (39). Meskipun demikian hal ini tidak serta-merta

---

<sup>16</sup> Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, (Asian Development Bank, 2010), h. 12

<sup>17</sup> Gerald M. Meler, *Frontiers of Development economics The Future In Perspective*, (Oxford is a registered trademark of Oxford University Press, 2001), h. 4

<sup>18</sup> Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 2010, dalam Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, (Asian Development Bank, 2010), h. 5

<sup>19</sup> Onaolupo, Levine, dalam Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug, 2017), h. 3.

mendorong daya saing Indonesia ke level maksimal mengingat daya saing harus melibatkan seluruh aspek. Indonesia memiliki keunggulan dalam kemampuan berinovasi akan tetapi setiap warganya belum memiliki akses dan kesempatan yang sama, serta masih terdapat banyaknya hambatan yang menghalangi inovasi pada level yang maksimal.<sup>20</sup>

Berdasarkan sensus ekonomi tahun lalu, BPS mendapati sebanyak 26,71 juta usaha tersebar di Indonesia. Itu didasarkan pada hasil sensus ekonomi 2016. Jumlah tersebut naik 17,51 ketimbang perolehan sensus ekonomi 2006, sebesar 22,73 juta usaha. Sekitar 15 kelompok usaha dalam sensus ekonomi 2016. Terbesar adalah kelompok perdagangan besar dan eceran. Jumlahnya mencapai 12,3 juta atau 46,17 persen dari total usaha di Tanah Air. Lantaran terbesar, wajar jika kelompok usaha perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja paling tinggi. Jumlahnya mencapai 22,4 juta pekerja atau 31,81 persen dari total pekerja di Indonesia. Di peringkat selanjutnya, bertengger kelompok penyediaan akomodasi dan penyediaan air minum yang menguasai sebesar 16,72 persen dari total 26,71 juta usaha di Tanah Air. Disusul Industri pengolahan 16,53 persen.<sup>21</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016. Dari sensus tersebut, ditemukan ada peningkatan usaha sebesar 17,51 persen menjadi 26,71 juta usaha atau perusahaan di Indonesia. Dari laporan BPS, mencatat sebaran usaha atau perusahaan antar pulau, 79,35 persen usaha atau perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatra dan Jawa). Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan atau 60,74% terhadap seluruh usaha / perusahaan di Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara, bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan atau 98,33% berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta /perusahaan atau 1,67% berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Adapun dari sisi jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.<sup>22</sup>

Salah satu sebab tingginya tingkat kemiskinan, termasuk di Indonesia, adalah terbatasnya akses penduduk miskin dan UMK kepada sumber daya, baik sumber daya pendidikan, kesehatan, dan khususnya sumber daya keuangan.

Rendahnya akses kepada lembaga keuangan ini juga terkonfirmasi oleh tingkat inklusi keuangan yang relatif rendah. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks Inklusi Keuangan (FII) Indonesia baru sekitar 20 persen, terendah di ASEAN dan hanya sedikit di atas Kamboja, Myanmar, dan Laos. Melalui peningkatan inklusi keuangan ini, industri perbankan

---

<sup>20</sup> <https://syafaatmuhamari.wordpress.com/2017/02/17/mendorong-inovasi-meningkatkan-daya-saing-global-1/>

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, 2017

<sup>22</sup> *ibid*



dapat berperan ikut memberantas kemiskinan<sup>23</sup>. Sebagaimana yang dilakukan India, pemerintah Indonesia seharusnya mampu melakukan terobosan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi pedesaan yang inklusi, melalui pengembangan UMK.

Bank Sentral India menempuhnya melalui strategi keuangan inklusi, yang esensinya adalah *poor is bankable*, masalah yang dihadapi di perbankan India tidak jauh berbeda dengan Indonesia, masalah UMK berkisar pada lemahnya akses dan informasi pasar karena jaringan dan informasi pasar biasanya dikuasai pasar tengkulak atau pengepul, lemahnya akses ke lembaga keuangan karena tiadanya jaminan dan terutama UMK tidak punya kebiasaan membuat laporan keuangan yang sederhana sekalipun yang memang diperlukan oleh perbankan untuk melakukan penilaian kelayakan, kualitas produk yang rendah dan tidak standar, kurangnya pengembangan produk karena lemahnya penguasaan teknologi atau tiadanya informasi pasar mengenai produk.

### **E. Strategi Inklusi Keuangan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa**

Inklusi keuangan memiliki sasaran yang sudah ditetapkan. Dari sasaran ini pula, disusun strategi untuk mencapai tujuan dilaksanakannya inklusi keuangan. Adapun sasaran<sup>24</sup> dari inklusi keuangan adalah sebagai berikut :

- Masyarakat miskin berpendapatan terendah.

Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

- Miskin Bekerja.

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan pedesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan.

- Bukan Miskin.

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja. 1 Kategori ini, walaupun fokus pada kelompok hampir miskin (*near-poor*), juga mencakup mereka yang bukan

---

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

<sup>24</sup> Departemen Pengembangan akses Keuangan dan UMKM, *Boklet Keuangan Inklusif*. (Bank Indonesia, 2014), h. 9-10

miskin (termasuk kelas menengah dan masyarakat yang mampu secara ekonomi). Strategi keuangan inklusif mencakup semua orang yang berada di luar sistem keuangan, termasuk mereka yang bukan miskin (non-poor), yang meski pun memiliki peluang akses lebih besar, karena berbagai alasan belum masuk sistem keuangan.

- Pekerja Migran Domestik dan Internasional.

Indonesia merupakan negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim di sebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).

- Perempuan.

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.

- Penduduk daerah terpencil.

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan).

Dari sasaran yang sudah disebutkan, pemerintah mempunyai peran strategis untuk mendorong tumbuhnya daya saing ekonomi pedesaan yang inklusif. Sesungguhnya, ekonomi pedesaan mampu tumbuh dari kekuatan dirinya sendiri. Yang diperlukan adalah pemerintah berperan sebagai katalisator dan akselator dengan mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Pemerintah seharusnya fokus pada aspek berikut.

*Pertama*, penyediaan infrastruktur pedesaan yang layak, seperti jaringan irigasi, jalan-jalan desa, pasar desa. *Kedua*, mendorong peningkatan akses ke sektor keuangan melalui program penjaminan, mendorong perbankan untuk juga menerapkan jaminan sosial seperti jaminan tanggung renteng, program pengembangan manajemen sederhana dengan melibatkan lembaga keuangan. *Ketiga*, meningkatkan akses pasar melalui penyediaan informasi pasar. Pengembangan produk, pengembangan jaringan pasar. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan input dan tidak justru mematikan UMK dengan mengundang pemilik usaha dengan modal besar menjadi pesaing yang mematikan.

Inti inklusi keuangan adalah bagaimana menghubungkan orang, baik individu maupun kelompok, kepada bank dan kemudian mendapat manfaat dari keterhubungan tersebut. Dengan demikian, kebijakan inklusi keuangan adalah kebijakan untuk membangun kapasitas sehingga orang tersebut dapat menciptakan peluang ekonomi dan sosial untuk bertahan dan keluar dari guncangan-guncangan karena keterbatasan pendapatan melalui fungsi-fungsi perbankan dan lembaga keuangan, seperti penghipunan dana, penyaluran kredit, asuransi, dan produk-produk keuangan lainnya.

Menurut catatan Bank Dunia, Negara-negara dengan tingkat inklusi keuangan rendah cenderung tingkat kemiskinan dan kesenjangan tinggi. Pada Negara berpenghasilan tinggi, 87 persen penduduk mereka telah tercatat mempunyai rekening pada lembaga keuangan, sementara di Negara berpenghasilan rendah hanya sekitar 24 persen, hanya sekitar 12 persen dari penduduk Negara berpenghasilan tinggi melakukan pinjaman dari individu atau sadara, dan kira-kira sebesar 30 persen pada Negara berpenghasilan rendah. Sekitar 13 persen penduduk Negara berpenghasilan tinggi yang menerima pendapatan mereka melalui lembaga keuangan, dan hanya sekitar 5 persen di Negara-negara berpenghasilan rendah.<sup>25</sup>

Sementara itu, inklusi keuangan di seluruh provinsi di Indonesia ditunjukkan oleh data hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan tahun 2016 cenderung memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi DKI Jakarta adalah yang terbaik karena memiliki indeks literasi keuangan

---

<sup>25</sup> OECD *Economic Surveys: Indonesia 2015*, Originally published by the OECD in English and in French, Bank Dunia, 2015

yang tinggi yaitu 40,0% dan indeks inklusi keuangan 78,2%. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat memiliki indeks inklusi keuangan yang relatif rendah. Namun demikian, jumlah provinsi yang memiliki indeks inklusi keuangan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata tidaklah banyak.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya bersama untuk mendorong agar semua provinsi di Indonesia memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi (*high literacy – high inclusion*). Untuk itu diperlukan strategi jangka panjang guna mencapai target yang diharapkan yaitu semua daerah memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Provinsi yang berada di posisi *low inclusion* perlu didorong untuk lebih banyak memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara provinsi yang berada di posisi *high inclusion* perlu mendapatkan lebih banyak edukasi keuangan agar dapat mengoptimalkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Fakta itu memperkuat keyakinan bahwa mendorong meningkatnya inklusi keuangan merupakan kebijakan tepat untuk memberantas kemiskinan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong peningkatan keuangan tersebut sudah berjalan efektif dan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan? Masih perlu dikaji lebih detail.

## F. Penutup

Dari paparan makalah dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan sektor keuangan karena sektor keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, sektor perbankan sebaiknya didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit, terutama kredit investasi yang produktif dengan memegang teguh prinsip manajemen resiko. Dengan demikian akan bermunculan proyek investasi, akan mendorong meningkatnya permintaan produk-produk keuangan seperti penyaluran kredit sehingga interaksi antara sektor moneter dengan sektor rill perlu ditingkatkan agar dapat menggerakkan perekonomian nasional.
- Pemerintah perlu mempromosikan kesadaran keuangan, khususnya untuk keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini dapat membantu mereka menghindari utang, meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan keluarga dan melepaskan diri dari kemiskinan. Hal ini dapat terjadi hanya ketika mereka memiliki pengetahuan baik tentang penggunaan jasa keuangan dan produk perbankan. Penerapan inklusi keuangan dapat diterapkan melalui pembayaran sosial kelompok miskin, pemberian kredit dengan skema yang compatible

---

<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (OJK: Jakarta, 2017),53

dengan usaha mikro dan kecil disertai dengan penjaminan dana perbankan, serta layanan keuangan digital. Secara keseluruhan, inklusi keuangan merupakan salah satu strategi dalam pencapaian pertumbuhan inklusif yang pada akhirnya akan mereduksi ketimpangan yang ada di masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

### G. Referensi Rujukan

A Demirguç-Kunt,., Beck T., Honohan P. “*Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*”. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report, 2008).

Ali dan Zhuang, *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*, Asian Development Bank, 2007

Badan Pusat Statistik

Departemen Pengembangan akses Keuangan dan UMKM, *Boklet Keuangan Inklusif*, Bank Indonesia, 2014

<https://syafaatmuhari.wordpress.com/2017/02/17/mendorong-inovasi-meningkatkan-daya-saing-global-1/>

Gerald M. Meler, *Frontiers of Development economics The Future In Perspective*, Oxford is a registered trademark of Oxford University Press, 2001

Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, SP 58/DHMS/OJK/XI/2019.

Josua Pardede, *Menuju Ketangguhan Ekonomi; Sumbangan 100 Ekonom Indonesia: Inklusi Keuangan Untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2017

Kuri Pravat Kumar, Laha Arindam, *Rural Credit Market and the Extent of Tenancy: Micro Evidence from Rural West Bengal*, Ind. Jn. of Agri. Econ. Vol.66, No.1, Jan.-March 2011

Lederle Nicole, *Exploring the Impacts of Improved Financial Inclusion on the Lives of Disadvantaged People*, Heriot-Watt University School of the Built Environment, 2009

Mohammed Ibrahim Jabir, *Financial Inclusion And Poverty Reduction In Subsaharan Africa*, College Of Humanities University Of Ghana, 2015

OECD *Economic Surveys: Indonesia 2015*, Originally published by the OECD in English and in French, Bank Dunia, 2015

Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 8, Issue 4 Ver. II, (Jul.– Aug.2017

Onaolupo, (2015), Levine, (2005), dalam Ogunsakin, Sanya, Fawehinmi Festus Olumide, *Financial Inclusion as an Effective Policy Tool of Poverty Alleviation: A Case of Ekiti State*, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume

Otoritas Jasa Keuangan, 2017. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, OJK: Jakarta

Piotrowska Maria, *The Direct and Indirect Effects of the Pro-Poor Growth*, 2004), 252, dan Ravallion, *A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research; Working Paper 3579*, April 2005). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 2010, dalam Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank, 2010

Sanjaya I Made, Nursechafia, “*Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*”, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.

Stephan Klasen, *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*, Asian Development Bank, 2010.